

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

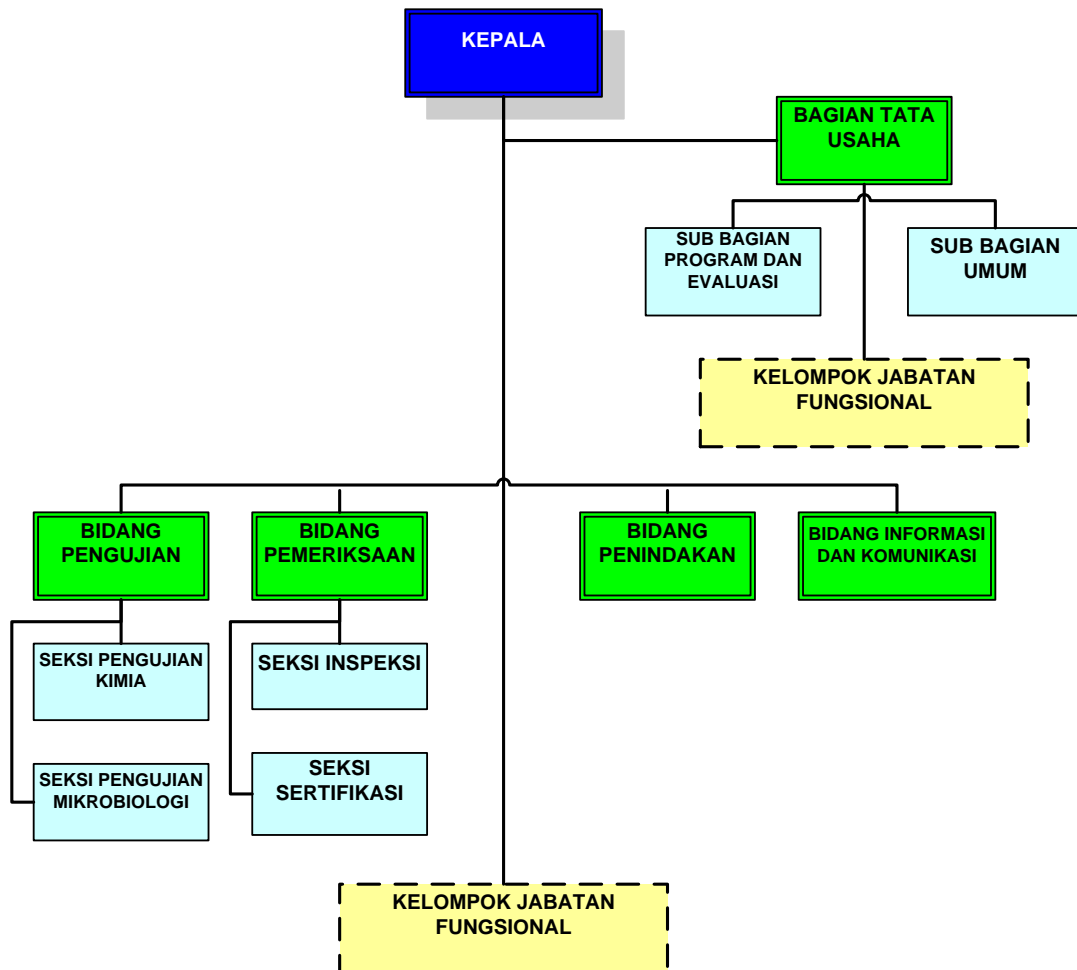
BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

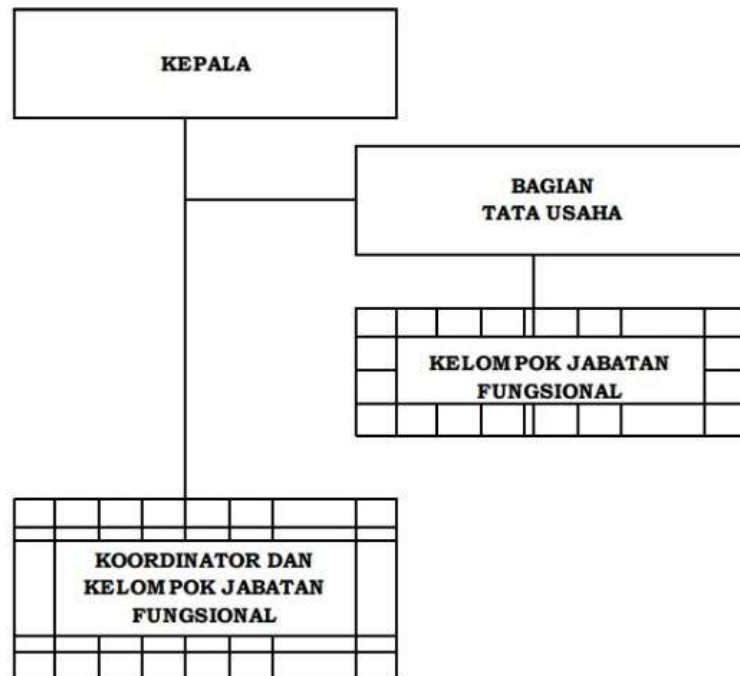
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM



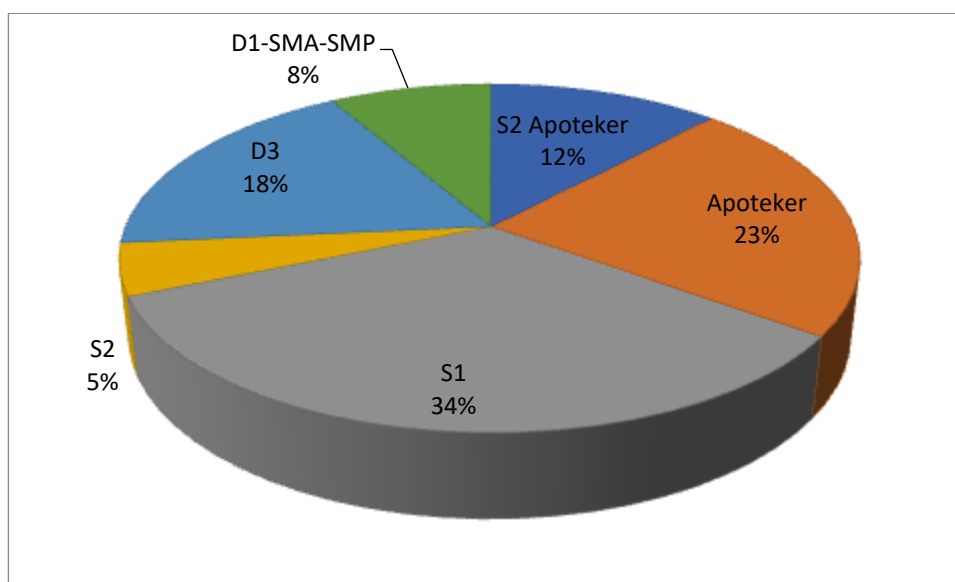
Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Palembang yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BPOM 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 181 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Oktober 2021 sejumlah 83 orang dengan proporsi 73,49% perempuan dan 26,51% laki-laki yang tersebar di masing-masing kelompok/subkelompok substansi dan bagian di Balai Besar POM di Palembang. Jumlah SDM BBPOM di Palembang tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Palembang memerlukan SDM sebesar 181 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 98 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang.



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Palembang sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	91,19	112,86
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	86,52	110,92
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,09	100,09
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	79,66	106,21
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	72	78,14	108,53
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,24	104,56
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87	98,87	113,64
		10.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	55	63,76	115,93
		11.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	100	117,65
		12.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	20,62	41,24%
		13.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	61,80	103,00
		14.	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	3,51	3,80	108,26
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,	15.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	16. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		17. Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100
		18. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82	95,88	116,93
		20. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75	98,81	131,75
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	81,72	96,14
		23. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	78,87	97,37

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	85,29	113,72
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	70	70,50	100,71
		26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	2,5	165,56
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	97,86	105,23
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (100%)	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Palembang selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Palembang dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna

mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Palembang juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratory (BSL) 2* yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Palembang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BBPOM di Palembang tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BBPOM di Palembang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

- 2) Peran BPOM di Palembang dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BPOM di Palembang masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid*.
 - 2) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM di Palembang dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM di Palembang mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**
Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”**
Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*).
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”**
khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme

rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Palembang dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. **Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Palembang** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya	1. Persentase		

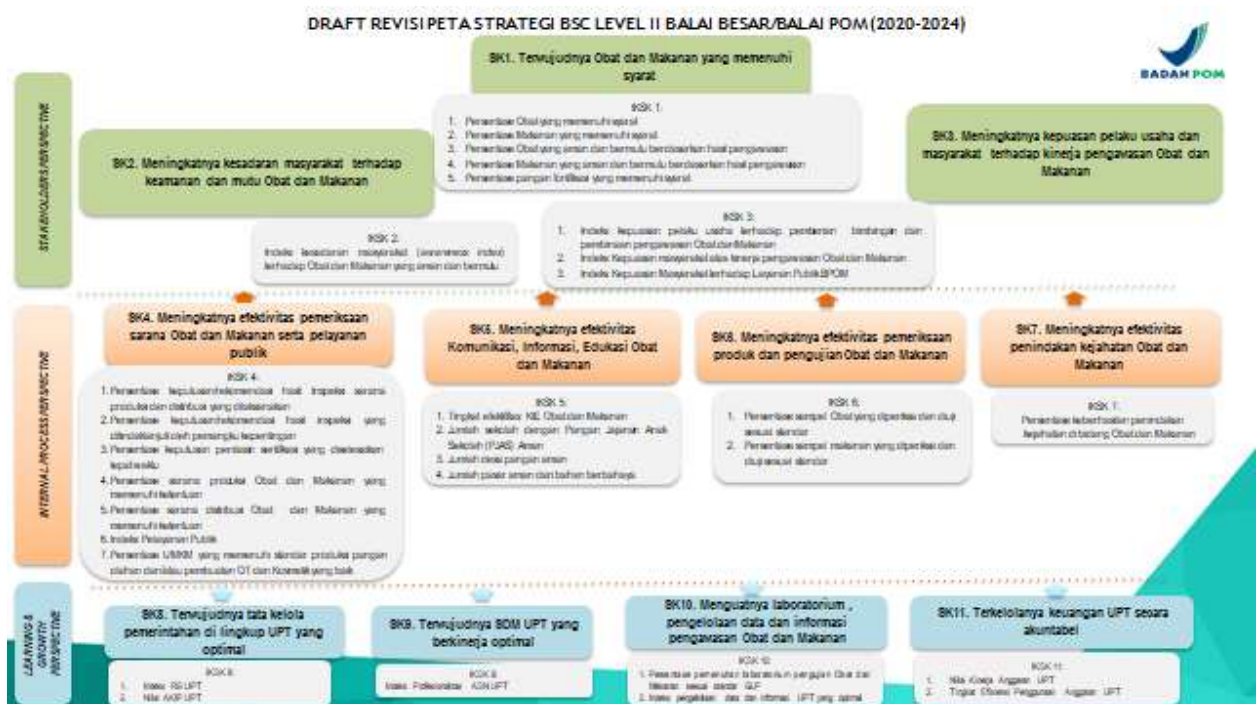
	efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

	masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan: *) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Palembang

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Palembang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Palembang sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

C. **Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

1. **Arah Kebijakan BBPOM di Palembang**

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Palembang, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Palembang, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Palembang harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BBPOM di Palembang Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai dengan Perubahan Arahan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan	4. Peningkatan pemahaman,

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Palembang

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Palembang sesuai Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Palembang mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Palembang, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024. Kedua kerangka tersebut

masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Palembang dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Palembang yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 BPOM, tidak terdapat perubahan** pada level sasaran strategis namun pada level indikator ada yang bertambah seperti Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada yang dihilangkan yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang serta **dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU BPOM sebelumnya, secara umum target tetap dan meningkat dan saat ini dengan bertambahnya 2(dua) indikator kinerja dan berkurangnya 1(satu) indikator kinerja total indikator menjadi 29(dua puluh sembilan) Indikator kinerja utama. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Palembang**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- b. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**, di mana penurunan target di sebabkan baseline data tahun 2020 kenaikan indeks tidak terlalu tinggi sehingga progress dari tahun ke tahun perlu diturunkan agar capaiannya maksimal di tahun 2024, namun hal ini dapat direviu kembali di tahun 2022.

- c. **Persentase Saran Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**, di mana penurunan target disebabkan capaian tahun 2020 jauh dibawah target diakibatkan banyaknya sarana industri rumah tangga pangan yang masih perlu dibina agar memenuhi ketentuan.
- d. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dimasing-masing wilayah kerja BPOM di Palembang**, hal ini karena pada tahun 2020 terjadi penurunan target karena refocusing anggaran pada masa pandemi sehingga capaian target kumulatif diturunkan disesuaikan dengan penurunan umlah sekolah di tahun 2020.
- e. **Indeks RB dan Nilai AKIP**. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	80,8	83,6	86,6	90	92,3	91,19	91	91,5	92	92,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	78	80	82	84	86	86,52	86,5	88	89,5	91
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	95	95	96	96	97	95,09	95	96	96,5	97
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	75	76	77	78	80	79,66	80	82	83	85
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	91	92	93	94
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	78,14	81	84	86	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	87,67	88,8	89,9	91	92,1	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92	91,74	91,75	92	92,5	93	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95	98,87	99	99,5	100	100	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75	63,76	60	65	70	75	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97	100	100	100	100	100	
	<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	50	55	60	65	70	20,62	55	55	60	65	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
	<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	60	63	66	68	71	61,80	63	66	68	71	
	Indeks Pelayanan Publik						3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							-	77	79	81	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	93,79	94	95,4	96,8	98,3	
	<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	20	40	62	82	104	16	40	59	78	97	
	<i>Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	6	12	19	25	32	4	12	19	25	32	
	<i>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	3	6	9	13	17	2	6	9	13	17	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	82	85	88	91	94	95,88	100	100	100	100
	<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	75	77	80	83	85	98,81	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan</i>	52	58	64	69	75	56,74	58	64	69	75
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	<i>Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	85	89	93	94	95	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9
	<i>Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	81	85	90	91	92	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91	85,29	84,5	84,75	85	85,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	70,50	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1,51	2	2,26	2,5	3	2,5	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	yang optimal										
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (92%)</i>	<i>Efisien (94%)</i>	<i>Efisien (96%)</i>	<i>Efisien (99%)</i>	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (100%)</i>	<i>Efisien (93%)</i>	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Palembang serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BBPOM di Palembang Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	Kepala Bidang Pengujian	Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	
3	Kepala Bidang Pemeriksaan	
4	Kepala Bidang Penindakan	
5	Kepala Seksi Pengujian Kimia	
6	Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi	
7	Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaaa	
8	Kepala Seksi Sertifikasi Bidang Pemeriksaan	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
10	Kepala Sub Bagian UMUM	

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Palembang secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Palembang 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI PALEMBANG
 PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									UPT BPOM			
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang											
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	91,19	91	91,5	92	92,5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM		
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	78	80	82	84	86	2	<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	86,52	86,5	88	89,5	91	Pro PN		UPT BPOM		
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95	95	96	96	97	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95,09	95	96	96,5	97			UPT BPOM		
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	75	76	77	78	80	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	79,66	80	82	83	85			UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
								5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		91	92	93	94	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	78,14	81	84	86	89			UPT BPOM
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	86	87	88	89	90	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87,67	88,8	89,9	91	92,1			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01			UPT BPOM
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	89,5	90	90,5	91	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	91,74	91,75	92	92,5	93			UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT									
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	98,87	99	99,5	100	100			UPT BPOM
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	63,76	60	65	70	75			UPT BPOM
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	100	100	100	100	100			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	50	55	60	65	70		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	20,62	55	55	60	65	Pro PN		UPT BPOM
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	60	63	66	68	71		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	61,80	63	66	68	71	Pro PN		UPT BPOM
									6	Indeks Pelayanan Publik	3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	Pro PN		UPT BPOM
									7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84		1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	93,79	94	95,4	96,8	98,3			UPT BPOM
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	20	40	62	82	104		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	16	40	59	78	97	Pro PN		UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	6	12	19	25	32		3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	4	12	19	25	32	Pro PN		UPT BPOM
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	3	6	9	13	17		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	2	6	9	13	17	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,88	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,81	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	52	58	64	69	75		1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	56,74	58	64	69	75	Pro PN		UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal									
	1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	89	93	94	95		1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9			
	2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	85	90	91	92		2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								
	1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91		1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,29	84,5	84,75	85	85,25		
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	70,50	77	82	87	92		UPT BPOM dan PPPOMN
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	2,5	2	2,25	2,5	3		UPT BPOM
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97		1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9	99,0		
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (100%)	Efisien (93%)	-	-	-		

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Palembang serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang.
- b. BBPOM di Palembang selaku unit pelaksana teknis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Palembang tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Palembang sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Palembang agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang. BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Palembang dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Palembang ini, diharapkan BBPOM di Palembang terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI